PROFESIONALISME PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA BIAU KECAMATAN BIAU KABUPATEN GORONTALO UTARA

ARTIKEL JURNAL

EFENDY S. PAKAYA
NIM: D02420009

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2023

PROFESIONALISME PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA BIAU KECAMATAN BIAU KABUPATEN GORONTALO UTARA

Efendy S. Pakaya[1], Rusly Abdurrahman Idji[2], Umar Sako Baderan[3]
[1,2,3]Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2024
Email: efendypakaya@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the professionalism of financial management in Biau Village, Biau District, North Gorontalo Regency. Research methods using qualitative types. The results showed that the professionalism of financial management in Biau Village was not optimal. 4 (four) indicators that have been used as a benchmark for research have not been fulfilled, this can be seen from the knowledge indicator, namely there are still apparatuses who do not understand the rules and duties as implementers of village financial management, skill indicators, namely there are still village apparatuses who are not proficient in using computer technology and operating the siskeudes application, ability indicators, namely overall financial management can be completed but in a way Individuals still have some apparatus who have not been able to complete their tasks so that they are still assisted by other apparatuses, and indicators of experience (experience) are all previous apparatuses no one is experienced and self-taught and has not maximized technical training on village financial management.

Keywords: *Financial Management, Professionalism*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Di Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme Pengelolaan Keuangan di Desa Biau belum optimal. 4 (empat) indikator yang dijadikan tolak ukur penelitian belum ada yang terpenuhi, ini terlihat dari indikator knowledge (pengetahuan) yaitu masih ada aparatur yang belum memahami aturan dan tugasnya sebagai pelaksana pengelola keuangan desa, indikator skill (keterampilan) yaitu masih ada aparatur desa yang belum mahir menggunakan teknologi komputer dan mengoperasikan aplikasi siskeudes, indikator ability (kemampuan) yaitu secara keseluruhan pengelolaan keuangan dapat diselesaikan namun secara individu masih ada beberapa apatur yang belum mampu menyelesaikan tugasnya sehingga masih dibantu oleh aparatur lain, dan indikator experince (pengalaman) yaitu semua aparatur sebelumnya tidak ada yang berpengalaman dan belajar secara otodidak serta belum maksimalnya pelatihan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Profesionalisme

PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa disebutkan bahwa profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Seseorang dapat dinyatakan profesional jika pekerjaanya memiliki spesifikasi atau prinsip-prinsip suatu profesi. Pekerjaan yang profesional disokong oleh suatu keahlian tertentu secara intens yang di

dapat dari berbagai lembaga pendidikan yang sesuai sehingga performanya didasarkan kepada pengetahuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Wina Sanjaya, 2006). Orang yang profesional harus mempunyai kemahiran diperoleh melalui suatu jenjang pendidikan dan memiliki jiwa semangat dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Profesionalisme secara umum berkaitan dengan tanggung jawab yang dimiliki Sehingga, penerapannya bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Secara khusus profesionalisme diterapkan dalam lingkup pekerjaan atau bisnis. Namun profesionalisme bisa diterapkan dalam hal lain di luar pekerjaan. Profesionalisme merupakan istilah yang didasari oleh sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalannya (Surya, 2007). Profesionalisme berarti fokus melakukan sesuatu pekerjaan pokok yang disebut profesi. artinya pekerjaan tersebut bukan pekerjaan tambahan sebagai pengisi waktu luang atau pekerjaan yang bersifat sementara sebagai sampingan dan hobi. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan isme sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai bentuk komitmen dalam bekerja keras, disiplin waktu, kredibilitas, loyalitas dan penuh dedikasi demi mencapai keberhasilan pekerjaannya.

Profesi berasal dari bahasa Latin "*proffesus*" yang berarti mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keilmuan tertentu dan juga menuntut pelaksanaan etika serta norma-norma sosial. Secara luas, profesi mencakup segala kegiatan dan tempat di mana seseorang menggunakan keahlian khususnya untuk memperoleh penghasilan. Istilah "profesional" berlaku untuk semua tingkatan aparat, dari yang paling atas hingga bawah. Profesionalisme dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidang dan tingkatannya masing-masing. Profesionalisme melibatkan kesesuaian antara kemampuan individu dengan tugas yang dihadapi, yang menjadi syarat utama bagi terbentuknya aparat yang profesional. Dengan kata lain, keahlian dan keterampilan aparat mencerminkan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi (Kurniawan, 2005). Sedangkan menurut Sanusi dan kawan-kawan, profesi adalah pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus dari para anggotanya. Ini berarti pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh individu yang tidak memiliki dasar atau tidak disiapkan secara khusus untuk melaksanakannya. Profesionalisme dianggap sebagai sesuatu yang terkait dengan pekerjaan dan membutuhkan keterampilan khusus untuk melakukannya. Profesionalisme juga merujuk pada upaya untuk menjalankan suatu pekerjaan berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki seseorang, dan atas dasar pekerjaan tersebut, seseorang memperoleh pendapatan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.

Menurut Atmosoeprapto dalam Kurniawan (2005:74) indikator profesionalisme yaitu:

1. Memiliki pengetahuan *(knowledge),* dalam hai ini karyawan haruslah memiliki pengetahuan lebih yang ada pada bidang pekerjaan karyawan tersebut, misalnya saja karyawan yang bekerja pada divisi finansial paling tidak karyawan tersebut harus mengetahui tentang pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan;
2. Keterampilan *(skill)*, dalam hal ini karyawan harus memiliki keterampilan lebih untuk menunjang pekerjaan karyawan tersebut;

3. Bisa melakukan *(ability)*, karyawan harus mampu untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh atasannya pada dirinya: dan
4. Ditunjang dengan pengalaman *(experience)* yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu. Dalam hal ini pengalaman dapat dijadikan pembelajaran bagi diri karyawan untuk terus dapat menjalankan pekerjaannya.

Desa sebagai kesatuan wilayah paling bawah merupakan prioritas pemerintah dalam upaya pembangunan secara merata dan berkelanjutan sebagai langkah kongkrit dalam membangun bangsa. Karena itulah dalam melaksanakan perannya secara efektif dan efisien, memerlukan peran aparatur pemerintahan desa dalam perkembangan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Desa sebagai Lembaga pemerintah paling dasar dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik, perlu dipastikan bahwa aparatur desa dapat melakukan tugasnya secara professional. Sebagai tumpuan pembanguan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, aparatur desa harus bisa bekerja profesional demi suksesnya program - program kerja pemerintah secara optimal sesuai dengan harapan. Aparatur pemerintah desa harus memiliki keahlian untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan dengan yang dipersyaratkan.

Segala sesuatu yang menjadi penghalang dalam pembanguan sebuah desa tidak terlepas dari berbagai masaalah, diantaranya profesionalisme aparatur desa. Aparatur desa yang tidak professional akan menjadi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan dan perkembangan sebuah desa. Asas profesionalitas dalam undang-undang desa disebutkan aparatur desa harus memiliki keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan dalam melakukan tugas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, serta dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Artinya aparatur desa dengan segenap tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa harus mampu melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai denga apa yang diharapkan. Mengelola keuangan desa dalam jumlah yang besar mewajibkan profesionalisme dari aparatur desa terutama dari segi kemampuan perencanaan, penyusunan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa mengharuskan profesionalisme dari aparatur desa sebab pengelolaannya tidaklah mudah. Pemerintah desa tidak hanya akan mengelola dana dari APBN berupa dana desa dan alokasi dana desa dari APBD, tetapi juga menerima bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan dana hibah. Pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban dimaksud adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang sehat. Tercapainya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan tentu memerlukan sumberdaya manusia yang kompeten dan memiliki keahlian serta tata cara dan aturan keuangan yang ada. Prosedur dan pelaksanaanya telah

diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai pedoman bagi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan obeservasi awal, profesionalisme pengelolaan keuangan di desa biau kecamatan biau kabupaten Gorontalo utara dipandang belum terpenuhi. Pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa dianggap belum optimal. Aparatur desa masih belum mengetahui tugasnya sebagai pelaksana pengelola keuangan desa, tidak memiliki keterampilan menggunakan teknologi komputer dan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, belum mampu menyelesaikan tugasnya sebagai pengelola keuangan desa serta tidak berpengalaman dan belum mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Kondisi teoritis dari beberapa ahli tersebut diatas tentu saja merupakan rujukan untuk mewujudkan aparatur negara yang memiliki sikap profesionalisme didalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun demikian, fenomena yang terjadi khususnya dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan hal yang sebaliknya. Pengelolaan keuangan desa dipandang dijalankan oleh orang-orang yang tidak profesional. hal berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, karena pengelolaanya hanya dikendalikan oleh sebagian aparatur yang paham dengan aturan pengelolaan keuangan desa.

Beberapa Penelitian yang relevan yang telah dilakikan oleh peneliti lain yang telah mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi ini. Adapun penelitian tersebut dilakukan oleh **Reza Nurul Ichsan dan Lukman Nasution (2022).** Profesionalisme Kerja Terhadap Kinerja Kerja Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan yang berjumlah 47 pegawai. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh antara profesionalisme kerja terhadap kinerja kerja di Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan. Hal ini ditandai dengan $thitung$ = 2,234 dan nilai sig sebesar 0,0049. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa $thitung \geq ttabel$ yakni 2,234 ≥ 2,000.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh **Aminullah (2018).** Profesionalisme Dan kualitas Pelayanan (Telaah Implementasi Dalam penyelenggaraan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan Dan Keagamaan). Metode penelitian ini adalah kajian pustaka (library reseach) dengan analisis isi (content analysis). Hasil penlitian yang diperoleh adalah (1) implementasi profesionalisme pada penyelenggaraan diklat tahun 2016 secara umum relatif baik, terkait aspek hubungan kerja, koordinasi, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, hasil kerja, manfaat rapat di tempat kerja, serta rekutmen calon panitia, Peserta manyatakan puas tercatat 81,27%, sedangkan kurang puas 18,73% terahadap kinerja panitia dalam memberikan pelayanan. (2) implementasi kualitas pelayanan pada penyelenggaraan diklat tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, secara umum relatif baik, terkait dengan aspek pelayanan diklat. Hal ini terlihat dari pernyataan sebagaian besar peserta menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan panitia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data berdasarkan apa yang diucapkan, disarankan, dan dilakukan oleh informan atau sumber data. Pendekatan

ini bersifat "perspektif emic", yang berarti data yang diperoleh didasarkan pada pengalaman sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dirasakan, disarankan, dan dipikirkan oleh informan atau partisipan. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui pengumpulan data dari sampel atau populasi. Dalam konteks ini, penelitian deskriptif akan membantu dalam menggambarkan fenomena yang diamati tanpa adanya upaya untuk mengontrol atau mengubah variabel-variabel penelitian (Sugiyono, 2013).

Sumber data pada penelitian ini berupa hasil natural/situasi ilmiah, wajar tanpa rekayasa. Peneliti mencari informasi dari orang-orang dan dokumen tepat yang berada dalam lingkup situasi ilmiah tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa instrument penelitian/pengumpulan data dengan menggunakan beberapa cara antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer; Teknik pengumpualan data primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan penelitian langsung dilapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya:
   a. Kepala Desa (1 Orang);
   b. Perangkat Desa (4 Orang);
   c. BPD (1 Orang);
   d. Pendamping Desa (1 Orang); dan
   e. Masyarakat (1 Orang).
2. Data Sekunder; Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1) Obeservasi; pengamatan dilakukan tehadap obyek dan subyek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan cara pencatatan sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang di teliti.
2) Wawancara; yaitu kegiatan pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan informan dan pihak yang terkait lainnya untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang di teliti. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini di tentukan dengan metode purposive sampling, artinya bahwa penentuan informan secara sengaja dengan tujuan tertentu.dasar pertimbangannya ialah informan tersebut mengatahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Biau. Serta informan tersebut merupakan pelaku utama yang mengetahui sejauh mana profesionalime aparat dalam pengelolaan keuangan. Wawancara dilakukan dengan cara menggali sebnyak-banyaknya informasi secara jelas dan jujur dari informan sehingga hasil penelitian benar-benar menjawab permasalahan yang ada pada obyek yang di teliti (Sugiyono, 2013).
3) Dokumentasi; yaitu mengumpulkan bukti dan keterangan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan dan gambar yang dapat mendukung penelitian.

Hasil Penelitian

Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa, sumber daya manusia aparatur desa menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dengan tujuan tercapainya pengelolaan keuangan desa secara profesional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profesionalisme pengelolaan keuangan di Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Observasi dan identifikasi masalah akan dijawab melalui hasil wawancara dengan referensi teori Atmosoeprapto dalam Yesy Andriani (2015) yang menyebutkan indikator profesionalisme adalah:

1. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal dan memiliki hubungan yang sangat erat. Diharapkan, dengan pendidikan yang tinggi, pengetahuan seseorang akan semakin luas. Namun, orang yang berpendidikan rendah tidak selalu berpengetahuan rendah. Peningkatan pengetahuan tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal, tetapi juga bisa didapatkan dari pendidikan non-formal. Pengetahuan tentang suatu objek mengandung dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang. Semakin banyak aspek positif dari suatu objek yang diketahui, maka sikap seseorang akan semakin positif terhadap objek tersebut (Notoatmodjo, 2014).

Knowledge (pengetahuan) dalam konteks ini adalah tingkat pemahaman dan informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur Desa Biau. Pengetahuan mencerminkan kemampuan kognitif seorang aparatur desa, yaitu kemampuan untuk mengenal, memahami, menyadari, dan menghayati suatu tugas atau pekerjaan. Oleh karena itu, pengetahuan seorang aparatur desa dapat dikembangkan melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal. Pendidikan membekali seseorang dengan dasar-dasar pengetahuan, teori, logika, pengetahuan umum, kemampuan analisis, serta pengembangan watak dan kepribadian. Pengetahuan juga diperlukan dalam menyiapkan program-program yang tepat dalam pelaksanaan APBDes, sehingga pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diutamakan. Dengan mengutamakan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat, maka komunikasi antara aparat dan masyarakat akan terjalin dengan baik, serta masyarakat akan berpartisipasi lebih aktif dalam proses pelaksanaan APBDes tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme pengelolaan keuangan desa berdasarkan indikator pengetahuan (*knowledge*) belum optimal. Ini dibuktikan dengan masih adanya aparatur desa yang belum mengetahui tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa..

2. Keterampilan (Skill)

Keterampilan dapat menunjukkan aksi khusus yang ditampilkan atau sifat pelaksanaan keterampilan tersebut. Banyak kegiatan dianggap sebagai suatu keterampilan, yang terdiri dari beberapa keterampilan dan tingkat penguasaan yang dicapai oleh seseorang menggambarkan tingkat keterampilannya. Hal ini terjadi karena kebiasaan yang sudah diterima umum untuk menyatakan bahwa satu atau beberapa pola gerak atau perilaku yang diperluas bisa disebut keterampilan. Keterampilan karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Tujuan keterampilan kerja adalah untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan secara efektif dan efisien tanpa kesulitan, sehingga menghasilkan kinerja yang baik.

Tujuan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, maupun

sikap pegawai terhadap tugas-tugasnya. Keahlian yang dimiliki seorang karyawan akan membuatnya terampil dalam melakukan pekerjaan. *Skill* (keterampilan) adalah penguasaan terhadap berbagai teknik, prosedur, serta peraturan yang berhubungan dengan bidang tugas aparatur desa. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu maupun dalam kelompok.

Keterampilan ini harus dimiliki oleh setiap aparatur desa di berbagai bidang karena keterampilan meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan pemimpin, bawahan, rekan sekerja, maupun masyarakat. Keterampilan menjadi sangat penting sebagai dasar pengetahuan bagi setiap aparatur desa karena manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan interaksi dengan orang lain. Pencapaian tujuan organisasi sangat bergantung pada tingkat kerja sama yang ditunjukkan oleh aparatur desa yang didasari keterampilan. Profesionalisme dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai bidang dan tingkatan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme pengelolaan keuangan di Desa Biau, Kecamatan Biau, berdasarkan indikator skill (keterampilan) belum optimal. Ini dibuktikan dengan penggunaan teknologi komputer yang baru bisa dilakukan oleh beberapa aparatur desa, dan aplikasi sistem keuangan desa hanya dikendalikan oleh bendahara desa.

3. Kemampuan (*Ability*)

Thoha (2012) menyatakan bahwa kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Dapat dimengerti bahwa kemampuan adalah kecakapan atau potensi untuk menguasai suatu keahlian yang bisa merupakan bawaan sejak lahir atau hasil dari latihan atau praktek, dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakan. Setiap individu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan suatu tindakan.

Baron dalam Sunyoto (2015:10) mendefinisikan kemampuan (abilities) sebagai kapasitas mental dan fisik untuk melakukan berbagai tugas. Kemampuan yang relevan dengan perilaku di tempat kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemampuan intelektual (intellectual abilities) dan kemampuan fisik (physical abilities). Kemampuan ini mencakup pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang merupakan kemampuan kerja individu dalam menyelesaikan tugas yang ditanggungnya. Jadi, kemampuan kerja yang optimal selain didorong oleh kuatnya motivasi seseorang yang memadai, juga didukung oleh lingkungan yang kondusif. Kemampuan kerja sangat diperlukan karena dengan kemampuan yang dimiliki karyawan, tujuan organisasi dapat dicapai.

Seorang profesional adalah seorang pegawai yang memiliki kemampuan atau keahlian untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai bidangnya masing-masing sehingga memperoleh pengakuan atau penghargaan. Seorang pegawai yang profesional juga hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan salah satu syarat terbentuknya pegawai yang profesional. Artinya, keahlian dan kemampuan aparat mencerminkan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat ditarik kesimpulan bahwa profesionalitas

aparatur desa berdasarkan indikator kemampuan (*ability*) belum optimal. Ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa meskipun secara umum kegiatan pengelolaan keuangan dapat diselesaikan, masih ada aparatur yang belum dapat melaksanakan tanggung jawab bidang pekerjaan yang dipercayakan kepadanya secara individual.

4. Pengalaman (*Experience*)

Pengalaman adalah hasil dari interaksi alam dengan panca indera manusia, berasal dari kata peng-alam-an. Pengalaman memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan. Secara umum, pengalaman merujuk pada pemahaman praktis tentang bagaimana melakukan sesuatu, daripada pengetahuan konseptual. Pengalaman tidak hanya diperoleh melalui pekerjaan, tetapi juga melalui pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan diri oleh individu yang berkompeten.

Menurut John Dewey, pengalaman adalah interaksi aktif antara individu dan lingkungannya, di mana individu memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Carl Rogers menekankan pentingnya pengalaman aktual dan otentik dalam perkembangan pribadi yang optimal. Bagi Abraham Maslow, pengalaman adalah bagian penting dari pemenuhan kebutuhan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme pengelolaan keuangan di Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan indikator pengalaman (experience), belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya pengalaman kerja dalam pengelolaan keuangan di antara semua aparatur desa. Mereka mempelajarinya secara autodidak dan pelatihan teknis yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah tidak melibatkan semua aparatur desa dengan maksimal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Profesionalisme Pengelolaan Keuangan di Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, belum optimal. Keempat indikator yang dijadikan tolak ukur penelitian belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
   Masih ada aparatur yang belum memahami aturan dan tugasnya sebagai pelaksana pengelola keuangan desa.
2. Keterampilan (*Skill*)
   Masih ada aparatur desa yang belum mahir menggunakan teknologi komputer dan mengoperasikan aplikasi Siskeudes.
3. Kemampuan (*Ability*)
   Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan dapat diselesaikan, tetapi secara individu masih ada beberapa aparat yang belum mampu menyelesaikan tugasnya sehingga masih dibantu oleh aparat lain.
4. Pengalaman (*Experience*)
   Semua aparat sebelumnya tidak memiliki pengalaman dan belajar secara otodidak, serta pelatihan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa belum optimal.

Saran

Saran yang penulis sajikan terkait Profesionalisme Pengelolaan Keuangan di Desa Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

1. Perlunya memperhatikan kualifikasi dalam melakukan pengangkatan aparatur desa baik dari segi latar belakang pendidikan maupun pengalaman dalam bidang tugasnya. Hal ini akan membantu memastikan bahwa setiap aparat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas dan tanggung

jawabnya dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Kepala Desa sebagai pimpinan lembaga pemerintahan desa sebaiknya melaksanakan kebijakan yang mengharuskan semua aparatur desa untuk menguasai setiap aturan yang melekat pada pekerjaannya, termasuk aturan mengenai pengelolaan keuangan desa. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pengawasan, dan pembinaan secara berkala.
3. Perlunya meningkatkan kapasitas aparatur desa dengan melaksanakan pelatihan teknis yang melibatkan seluruh aparat desa. Pelatihan ini harus dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan bahwa setiap aparat desa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abeng, Tanri. (2006). Profesi Manajemen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Aminullah (2018) Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan (Telaah Implementasi Dalam Penyelenggaran Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan)

Arikunto. (2010). Prosedur Penelitan. Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Bina Aksara.

Atmosoeprapto, Kisdarto, (2001). Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan, Jakarta : PT. Gramedia.

Fitria, Annisa. (2021). Profesional Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Pulau Jambu

Hasibuan, (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia (Cetakan Ke-18) (Revisi Ed). Jakarta : PT. Bumi Aksara

Kurniawan, (2015) Karakteristik Profesionalisme Aparatur Sesuai Dengan Tuntutan Good Governance Publik. Yogyakarta : Pembaharuan

Mariana, (2009). Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Tingkat Agresifitas Pada Anak Jalan Di T. Amplas Dan T. Pinang Baris Skipsi : Fakultas Psikologi UMA Tidak Diterbitkan

Mohammad Zain (1996) Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Muhammad Ikbal. Haeruddin Syarifuddin. Saifullah (2019) Pengaruh Profesionalisme Kerja Aparat Terhadap Kualitas Kerja Di Kantor Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

Notoadmodjo, Soekidjo. (2009). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rineka Cipta.

Reza Nurul Ichsan. Lukman Nasution (2022). Profesionalisme Kerja Terhadap Kinerja Kerja Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan

Rusby, Zulkifly. Manajemen Sumber Daya Manusia, Pekan Baru : Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.

Siagian, Sondang P. (1995). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.

Siagian, (2009). Kiat Meningkatakan Produktivitas Kerja. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Siahaan P

Suhrawardi K Lubis (2000). Etika Profesi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika

Surya (2007). Percaya Diri Itu Penting. Jakarta : PT Elex Media. Komputindo Husdarta Dan Nurlan Kusmaedi.

Sugiyono, (2009) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung : CV. Alvabeta.

Thoha, Miftah, 2009 Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi, Jakarta : Kencana